

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan keuangan lembaga publik, diantaranya:

Tabel 2.1

N	Judul	Peneliti	Hasil
1	Pengelolaan ADD Dalam Upaya Meningkat kan Pembangun an Di Desa.	Thoma s(2 013)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30%.

2	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru.</p>	<p>Sumiati (2015)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.</p>
3	<p>Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.</p>	<p>Dewanti dkk (2016)</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37</p>

			<p>tahun 2007 banyak sekali ketidaksesuaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMD dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDesa sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDesa sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDesa juga memiliki ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007.</p>
4	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan</p>	<p>Putra dk k (20 16)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga</p>

	Masyarakat Desa.		<p>penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.</p>
5	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.</p>	<p>Karimah (2014)</p>	<p>Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan</p>

			<p>infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan wujud dari pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK.</p>
--	--	--	--

Penelitian tentang analisi pengelolaan keuangan untuk menunjang efisiensi desa pada Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis yaitu pada periode laporan yang digunakan menggunakan metode analisis model interaktif milik Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, objek yang diteliti, dan lokasi penelitian.

B. Landasan Teori

1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Ulum (2008: 98) menyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Fungsi anggaran menurut Bastian (2010: 191-192) yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan proses rencana kerja.
- b. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
- c. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
- d. Anggaran sebagai alat motivasi dalam pencapaian visi organisasi.
- e. Anggaran merupakan instrumen politik.
- f. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal, dan
- g. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja setiap pelaksanaan kegiatan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 8 dijelaskan bahwa APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- b. Belanja Desa, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- c. Pembiayaan Desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- 1) Pendapatan Desa, terdiri atas kelompok:
 - a) Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 - b) Transfer, dan
 - c) Pendapatan Lain-Lain.
- 2) Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
 - a) Hasil usaha.
 - b) Hasil aset.
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan
 - d) Lain-lain pendapatan asli desa.
- 3) Hasil usaha desa, antara lain: hasil BUMDes, tanah kas desa.
- 4) Hasil aset, antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- 5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 6) Kelompok transfer, terdiri atas jenis:
 - a) Dana Desa.
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD).
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

- 7) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis: hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 8) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain : (1) hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan (2) bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

- 1) Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
 - e) Belanja Tak Terduga.
- 2) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:
 - a) Pegawai
 - b) Barang dan Jasa, dan
 - c) Modal
- 3) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- 4) Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Belanja Pegawai dianggarkan dalam:
 - a) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
 - c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan
- 5) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain: Alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga /rukun warga, dan, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

2. Definisi Pembangunan Desa

Menurut Kartasasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu (Salim, 2002 dalam Wrihatnolo, 2006)

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan,

dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Indonesia sebagaimana ditegaskan di atas memiliki tradisi yang sangat kaya berkaitan dengan pengambilan keputusan, khususnya di level desa. Dalam berbagai dengan atasan, atau antara masyarakat dengan pemerintahan yang diberi nama partisipasi vertikal.

4. Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas diartikan peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

5. Partisipasi Masyarakat Dilihat Dari Bentuknya

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Forum Inovasi (2002) dapat berupa; 1) mendiskusikan program atau rancangan kebijakan antara melalui *public hearing*, dialog interaktif; 2) menyampaikan usulan/keluhan dalam berbagai kegiatan; 3) menolak kebijakan dengan mendatangi kantor DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama; 4) merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan oleh masyarakat.